

EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KOTA PALU

Asfriqi Machfiroh

asfriqimagfiroh@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

Objective this research is to measure the effectiveness of National Program implementation for independent Urban Community Empowerment in Palu. Informants in this research are those directly involved with the National Program for independent Urban Community Empowerment in Palu. This research is a qualitative research. The methods used in collecting data are: in-depth interviews, direct observation, and Documentation.

Based on the research results, the implementation of National Program for independent Urban Community Empowerment in Palu has been effective, in terms of process it is going according to the cycle stages of implementation of National Program for independent Urban Community Empowerment in Palu. The implementation is conducted through several stages, namely: Socialization, planning, implementation and evaluation stage. This process is already carried out quite well, judging from the number of activities that have been accomplished. There are several factors that affect the successful of implementation of National Program for independent Urban Community Empowerment in Palu namely public support, good communication between the consultant and Community Self-Reliance Agency at village level, and the executive attitude is manifested by having executive commitment in terms of togetherness to build social environment. The fundamental matter that needs to be improved is to develop the participation attitude of citizen to be involved more actively in the implementation of of National Program for independent Urban Community Empowerment.

Keywords: *Effectiveness, Achievement, Integration and Adaptation*

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera tuntas, karena kemiskinan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah. Kondisi kemiskinan yang tengah dihadapi Indonesia dapat dilihat dari pendekatan konsumsi penduduk miskin, kemiskinan multidimensi dan kesenjangan antar wilayah.

Kemiskinan dalam hal ini juga merupakan salah satu pokok masalah kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2000) yaitu saling ketergantungan, yang artinya bahwa kemiskinan mempengaruhi masalah-masalah kebijakan di bidang lain.

Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2007-2015, seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palu adalah

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat angka kemiskinan dengan menggunakan data TNP2K 2013, dengan jumlah penduduk kota palu tahun 2013 sebesar 356.299 Jiwa, dengan mempunyai luas 395,06 km² terdiri dari delapan kecamatan.

Besarnya angka kemiskinan di kota, pemerintah melalui program PNPM-MP hadir dengan harapan mampu menjadi titik terang untuk awal perubahan itu, dimana konsep dasar dari PNPM-MP itu sendiri adalah “Pemberdayaan Masyarakat”. Konsep PNPM-MP menjelaskan bahwa manusia berdaya adalah ketika manusia mampu berbuat sesuai harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai masyarakat dalam kehidupan sosial. Dengan demikian kepedulian terhadap

sesama merupakan salah satu indikator pemberdayaan. Oleh karena itu penanganan kemiskinan dalam konteks PNPM-MP harus dilandasi pada pencarian orang-orang baik, pengorganisasian orang-orang baik hingga dapat mengoptimalkan tingkat penyelesaian pada tataran-tataran berikutnya. Berdasarkan konsep PNPM-MP yang menyelenggarakan Program penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan yang berbasis masyarakat, maka diharapkan kelompok masyarakat marginal mampu mengurangi ketertinggalan yang ada dengan adanya pengetahuan dan keterampilan.

Untuk meningkatkan efektivitas penganggulangan kemiskinan Kota Palu melalui salah satu program yang di percayai dapat melakukan pengentasan kemiskinan perkotaan adalah program PNPM-MP selaku badan pemberdayaan yang khusus menangani masalah kemiskinan perkotaan, program ini mengusung prinsip partisipasi warga dan transparansi akuntabilitas serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program PNPM-MP merupakan program pemberdayaan yang bersifat menggali kemiskinan dari tingkat bawah (*Bottom Up*) yang mempunyai tahapan siklus PNPM-MP di terapkan dalam pendampingan masyarakat dengan melalui pendataan keluarga miskin, *by name, by address*, dengan bantuan RT dan RW dan aparat kelurahan setempat (*Data PS2*). Program ini mengusung substansi partisipatif warga dalam membentuk lembaga BKM (Badan keswadayaan masyarakat) yang pelakunya adalah warga masyarakat kelurahan yang di pilih melalui pemilu BKM dan yang memilih anggota BKM tersebut adalah warga kelurahan itu sendiri, anggota BKM inilah yang akan mengawal perogram kemiskinan di masing-masing Kelurahan yang ada di Kota Palu.

Namun pada kenyataanya sebahagian masyarakat di Kota Palu yang memiliki latar belakang yang berbeda, sebahagian tidak mendukung pelaksanaan program PNPM MP,

sehingga untuk mencapai apa yang di inginkan dalam program PNPM MP sangatlah sulit di karnakan proses dari pelaksanaan program ini membutuhkan campur tangan semua pihak di kelurahan dan yang menjadi sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang ada di wilayah tersebut, sehingga pelaksanaan program di tingkat masyarakat kurang berjalan efektif, hal mendasar penyebab program PNPM MP tidak berjalan efektif adalah kurangnya tingkat partisipasi masyarakat, Kesibukan pribadi, ketidakpedulian akan orang-orang miskin yang ada disekitar RT, serta adanya kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan, oleh karena itu penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan program PNPM-MP dapat berjalan efektif sesuai apa yang di harapkan.

Adapun rumusan masalah pada penulisan ini adalah apakah penanggulangan kemiskinan dengan pola pemberdayaan masyarakat yang di usung oleh Program Nasioanl Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dapat berjalan efektif sesuai harapan masyarakat dan out put yang di harapkan oleh program PNPM MP?

Adapun Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Untuk mengetahui Efektif atau tidaknya program PNPM MP di Kota Palu. (2). Untuk Mengetahui program PNPM MP sebagai program pemberdayaan yang dapat mengakomodir keinginan masyarakat.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud

sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Teori efektivitas menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas pelaksanaan PNPM-MP Perkotaan di Kota Palu.

METODE

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Oversight Service Provider VIII di jalan Watukanjai No. 2a dengan pertimbangan

bahwa OSP VIII merupakan lembaga Pemberdayaan yang bertanggung jawab atas Penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Palu.

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode pemecahan masalah yang diteliti dengan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai keadaan obyek penelitian terhadap gejala-gejala yang terjadi pada obyek yang diteliti. Menurut Nawawi (2003) metode Deskriptif Kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penyajian datanya dilakukan dan disampaikan dengan menggambarkan fenomena sesuai dengan obyek yang diteliti secara sistematis berdasarkan data dan fakta di lapangan.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data primer: merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada informan yang dianggap representative dan mengetahui akan persoalan yang diteliti, dari jawaban dan wawancara tersebut kemudian diolah menjadi data utama yang kemudian menghasilkan suatu kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian secara keseluruhan. 2) Data sekunder: adalah jenis data pendukung utama dalam penelitian yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen baik yang tertulis maupun berupa gambar yang pernah ada serta buku sebagai referensi dalam penelitian ini dan Majalah, surat kabar, jurnal, website, yang berkaitan dengan topik yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggung jawab pengelolaan program tingkat nasional PNPM Mandiri Perkotaan adalah Departemen Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara program (*executin agency*). Untuk melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan terciptanya sinergi dengan program lainnya untuk mengoptimalkan hasil yang di capai dalam rangka keberlanjutan program sekaligus mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan), telah dibentuk Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP) sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 358/KPTS/M/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP)

Inti kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di masyarakat kelurahan/desa adalah proses menumbuhkembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran dan pelembagaan nilai-nilai universal kemanusiaan (*value based development*), prinsip-prinsip universal kemasyarakatan, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam pelaksanaan program PNP-MP di tingkat masyarakat berlangsung secara bertahap sesuai tahapan siklus PNPM-MP:

Tahapan I pelaksanaan kegiatan ini mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus Rembug Kesiapan Masyarakat dan Kerelawanan (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS) berorientasi IPM-MDGs, Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Perencanaan Partisipatif menyusun Program Jangka

Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) berorientasi kinerja peningkatan IPM-MDGs dan Rencana Tahunannya (Renta), serta pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat melalui KSM (kelompok swadaya masyarakat) dengan stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Tahap II Siklus ini diawali dengan serangkaian kegiatan meninjau-ulang kinerja kelembagaan LKM, capaian Rencana Tahunan, dan kinerja keuangan LKM, yang kemudian disampaikan dalam Rembug Warga Tahunan (RWT).

Tahap III siklus ini, pelaksanaannya sama dengan siklus II, dan Pada tahap VI siklus PNPM kembali pada siklus awal dengan Rembug Kesiapan Masyarakat dan Kerelawanan (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS) berorientasi IPM-MDGs, Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Perencanaan Partisipatif.

Pendanaan Program PNPM Mandiri perkotaan berasal dari sering dana propinsi dan daerah (dana APBN dan APBD). Dana Propinsi sebesar 95% dan dana daerah sebesar 5% dari total dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, PNPM Mandiri Perkotaan cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensi sebagai “gerakan masyarakat”, yakni, dari, oleh dan untuk masyarakat

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana efektifitas dari kebijakan Penanggulangan Kemiskinan khususnya Program Nasional penanggulangan kemiskinan Mandiri Perkotaan (PNPM MP) indikator penelitian sehingga dengan fokus kajian dapat diungkapkan fenomena yang

berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Masing-masing fokus kajian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam alur pikir dan definisi konsep akan dicermati secara mendalam menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga observasi dan wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian akan menghasilkan tanggapan dari informan mengenai efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikemukakan dalam fokus kajian yang meliputi: 1.) *Pencapaian Tujuan*: Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan indikator yang menjadi tolak ukur merupakan gambaran seberapa besar efektivitas dari kebijakan tersebut. Dengan kata lain sebuah kebijakan itu disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Dalam pembahasan ini peneliti memfokuskan pada aspek pertanyaan untuk meneliti sejauh mana pencapaian tujuan dari program penanggulangan kemiskinan atau PNPM-MP Kota Palu. Adapun pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: Target PNPM-MP: Pembahasan ini menggambarkan tujuan dari PNPM-MP yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan pada pelaksanaan siklus PNPM-MP sesuai waktu yang telah di targetkan per tahapan siklus yaitu 1 tahun. 2.) *Integrasi*: Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. PNPM-MP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui tahapan awal yakni diseminasi informasi dan sosialisasi tentang PNPM-MP yang dilakukan dalam beberapa cara. Lokakarya yang dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten,

kecamatan dan kelurahan untuk menyebarkan informasi dan mempopulerkan program. Di setiap kelurahan dilengkapi papan informasi sebagai salah satu media informasi bagi masyarakat. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait penyebaran informasi (media massa, NGO, akademisi, anggota dewan) menjadi bagian dalam kegiatan ini. Berdasarkan penjelasan diatas, integrasi dapat diartikan sebagai bentuk sosialisasi yang dilaksanakan dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan PNPM MP dan gambaran tentang tingkat kemampuan aparaturnya untuk mengadakan sosialisasi dalam program PNPM-MP. Berikut gambaran mengenai integrasi berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Sosialisasi dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan PNPM MP, secara umum, sosialisasi dapat diartikan sebagai proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Proses yang dimaksud adalah penyesuaian dengan lingkungan sekitar. Tahap awal jalannya sebuah program atau organisasi dimulai dengan proses sosialisasi. Hasil dari sosialisasi ini dapat menentukan perkembangan sebuah program atau organisasi agar menjadi lebih baik. Pada Siklus I PNPM MP diawali dengan tahapan Sosialisasi Awal yang meliputi: a. Mendapatkan gambaran dinamika sosial masyarakat, b. Penyebarluasan informasi tentang adanya program PNPM MP, c. Mengumumkan penerimaan relawan. 3.) *Adaptasi*: Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah apakah pengisian tenaga kerja sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dari pelaksana program itu sendiri. Peran aktif dari pelaksana program juga termasuk dalam adaptasi program, agar tujuan dari program dapat tercapai secara maksimal. Serta adanya tanggapan program dari lingkungan luar seperti keinginan sasaran, dan kualitas program itu sendiri. Dalam tahapan ini di

perlu kerjasama yang baik antar masyarakat dan pelaku pemberdayaan di tingkat masyarakat, dalam penelitian ini, di bidang adbtasi inilah yang kurang mendapat tempat di masyarakat dengan melihat kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada tahapan proses pelaksanaan program ini sehingga penilaian yang dilakukan oleh PNPM-MP melalui standar pengukuran melalui KPI (*Keep Perform Indicator*), menunjukkan nilai tidak mencukupi target.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota Palu berjalan Efektif pada tataran: 1.) *Pencapaian Tujuan*: proses pelaksanaan siklus dan pemanfaatan Bantuan langsung Masyarakat (BLM) sudah tercapai sesuai apa yang diharapkan, dengan melihat terselesaikan 1 tahapan siklus dan pemanfaatan BLM tahun anggaran 2014. 2.) *Integrasi*: Tahapan sosialisasi yang terjadi pada Proses Pelaksanaan PNPM sudah berjalan efektif melalui tahapan siklus PNPM sosialisasi di tingkat Kota dan di tingkat masyarakat, di kawal oleh fasilitator kelurahan, BKM, dan aparat Kelurahan. 3.) *Adaptasi*: Dalam penelitian mengenai kualitas pelaksanaan PNPM MP yang menjadi kendala kurang efektifnya pelaksanaan Program PNPM di tingkat masyarakat karna kurangnya partisipasi masyarakat kelurahan untuk terlibat langsung dalam mengikuti proses tahapan kegiatan yang dilakukan oleh program PNPM MP sehingga penilaian *Keep Performen Indicator* tidak mencukupi standart capaian.

Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang berkaitan dengan kurangnya adaptasi masyarakat terhadap kegiatan program PNPM Mandiri Perkotaan pada kurangnya keterlibatan masyarakat, karna dalam proses pelaksanaan PNPM MP masyarakat adalah unsur utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dalam mengikuti proses tahapan siklus PNPM MP, ini menunjukkan bahwa masyarakat belum berpartisipasi secara aktif pada kegiatan-kegiatan PNPM MP. Dengan demikian disarankan pada pelaku pemberdayaan di tingkat masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan: 1.) merubah perilaku masyarakat miskin dari tidak berdaya menjadi berdaya serta memotivasi masyarakat agar terlibat langsung pada kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dengan merubah pola pendampingan secara persuasif karna masyarakat merupakan subjek dari pemberdayaan oleh karna itu peran aktif masyarakat harus lebih ditingkatkan sehingga memperkuat kapasitas serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan, pemahaman akan konsep serta tujuan PNPM Mandiri itu sendiri akan tercapai. 2.) Perlu adanya sosialisasi yang intens sebelum dilaksanakan proses perencanaan, seperti menambah sosialisasi melalui media cetak, elektronik dll. 3.) Untuk mendukung dan mempercepat pencapaian masyarakat yang partisipatif pada tahapan tahapan PNPM MP, maka perlunya pemahaman kepada masyarakat tentang Tujuan, manfaat dan sangsi pada proses sosialisasi sehingga hal-hal yang menyangkut keterlambatan dalam proses kegiatan bisa di minimalisir sedini mungkin.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, khususnya kepada tim penyunting Bapak Prof. Dr Sulthan M, dan Dr. Moh Irfan Mufthi M.Si.Ahir kata penulis ucapkan banyak terimah kasih kepada Allah SWT dengan Rahmat dan hidayanya, kiranya apa yang telah di berikan ini dapat membawah manfaat dan semoga di balas dengan pahala yang lebih baik AMIN. Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

DAFTAR RUJUKAN

Agus Sujono dan Trilaksono Nugroho 2007. *Paradigma, Model, Pendekatan, pembangunan, dan Pemberdayaan di Era Otonomi Daerah*. Bayumedia blushing dan lembaga Penelitian&Dokumen FIA Unibraw, Malang.

Dunn, William, 1998, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Taerjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta, Gajah Mada University Press

Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2007, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media kompotindo Ramedia

Kementrian Pekerjaan Umum. 2010, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, “Bersama Membangun kemandirian” di terbitkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya-

Pranarka & Vidhandika (1996) *Pemberdayaan (Empowerment)*, Jakarta, CSIS

Rivanto, J (1989) *Produktifitas dan MC, Indo*, Jakarta, lembaga sarana Info Usaha Produktifitas

Steers, Richart M (1985) *efektivitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga